

Hubungan Faktor Penduduk Usia Produktif, Upah dan Kontribusi Sektor Konstruksi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Manokwari

ABSTRACT

This study aims to identify the relationship between the number of people of productive age, the provincial minimum wage, and the contribution of the construction sector to income inequality in Manokwari Regency. The secondary data used in the study was obtained from the Central Statistics Bureau and related institutions between 2013-2017. Descriptive statistical analysis methods and Pearson correlation explain how the direction of the relationship of each factor. The variables of Productive Population, Minimum Wage, and Contribution of the Construction Sector have a positive and significant relationship with Income Distribution Inequality, both partially and simultaneously. This inequality is caused by the high growth of the productive age population without adequate job availability, the influence of the minimum wage, and investment policies in the construction sector.

Keywords: productive population, wages, sector contribution, income inequality

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara jumlah penduduk usia produktif, upah minimum provinsi dan kontribusi sektor konstruksi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Manokwari. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait antara tahun 2013-2017. Metode analisis statistik deskriptif dan korelasi pearson menjelaskan bagaimana arah hubungan masing-masing faktor Variabel Penduduk Usia Produktif, UMP, dan Kontribusi Sektor Konstruksi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan, baik secara parsial maupun simultan. Ketimpangan ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk usia produktif yang tinggi tanpa ketersediaan lapangan kerja yang memadai, pengaruh upah minimum, dan kebijakan investasi di sektor konstruksi.

Kata kunci: penduduk usia produktif, upah, kontribusi sektor, ketimpangan distribusi pendapatan

PENDAHULUAN

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan, dimana semakin tinggi proporsinya maka akan semakin besar tingkat kesulitan untuk mengatasinya. Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan

pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat. Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bantika, Benu and Kapantow, 2015).

Dalam mengukur distribusi pendapatan diukur dari 2 ukuran pokok yaitu, distribusi pendapatan pribadi atau distibusi pendapatan personal dan distribusi fungsional yang mempertimbangkan individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Kemudian, Todaro and Smith (2006) menyebutkan bahwa distribusi penerimaan pendapatan penduduk secara umum yaitu 40% penduduk menerima pendapatan paling rendah, 40% penduduk menerima pendapatan menengah dan 20% menerima pendapatan yang paling tinggi.

Tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Manokwari di dukung oleh sektor-sektor usaha yang berkembang di daerah. Tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari perkembangan kinerja dan struktur perekonomian Kabupaten Manokwari memang bahwa sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Manokwari dari tahun ke tahun tetap dimiliki oleh sektor Konstruksi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor Transportasi dan Pergudangan. Namun, kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri besar, konstruksi, perdagangan dan keuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namun ketersediaannya lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan yang didominasi oleh sektor primer, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan terutama antara perkotaan dengan pedesaan.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses kenaikan pendapatan perkapita daerah dalam jangka panjang. Teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah adanya permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga sumber daya lokal berpotensi menghasilkan pendapatan daerah sekaligus dapat menciptakan peluang kerja di daerah. Hal ini berarti bahwa sumberdaya lokal baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia memegang peranan yang sangat strategis dalam perekonomian daerah. Sumberdaya lokal yang merupakan potensi ekonomi yang harus dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Octastefani and Kusuma, 2015).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Manokwari Berdasarkan Kelompok Umur (2013-2017)

Kelompok Umur	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
0-4	15,868	17,884	18,605	19,125	19,332
5-9	14,914	16,643	17,356	17,769	18,032
10-14	14,179	14,661	15,335	15,795	15,912
15-19	14,325	14,728	15,122	15,701	15,900
20-24	16,841	17,366	17,825	18,439	18,648
25-29	16,471	16,955	17,382	17,976	18,250
30-34	13,851	14,248	14,605	15,174	15,356
35-39	10,920	11,222	11,510	11,831	12,122
40-44	9,198	9,440	9,689	10,098	10,216
45-49	6,918	7,090	7,277	7,597	7,698
50-54	5,120	5,245	5,377	5,605	5,709
55-59	3,432	3,510	3,597	3,778	3,835
60-64	2,404	2,469	2,527	2,648	2,681
65-69	1,347	1,382	2,897	1,493	1,502
70-74	968	820	854	877	894
75+	756	633	664	680	693
Jumlah	147,512	154,296	160,622	164,586	166,780

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari, 2014-2017

Kabupaten Manokwari merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2012 dan Undang-Undang No.24 tahun 2012 pada bulan November 2012 secara administratif pemekaran pada Kabupaten Manokwari menjadi Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Manokwari Selatan. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa penduduk yang berusia 0 sampai 75 tahun keatas mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi seperti kematian, kelahiran, dan migrasi. Adapun penduduk yang berusia produktif adalah penduduk yang berusia dari 15 tahun sampai 65 tahun. Di usia tersebut seseorang dapat dikatakan sebagai tenaga kerja yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Jumlah penduduk usia produktif yang dimaksud adalah seseorang yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Ketersediaan lapangan kerja di kabupaten Manokwari yang masih sangat terbatas mengakibatkan sebagian dari jumlah penduduk usia produktif masih banyak yang menganggur.

Berdasarkan data dari BPS tahun 2014-2017, jumlah UMP untuk setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp.1.720.000, tahun 2014 sebesar Rp.1.870.000 (naik sebesar 8,72% dari tahun 2013). Pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.2.015.000, (naik 7,75% dari tahun 2014). Pada tahun 2016 tercatat UMP sebesar Rp.2.237.000 (naik 11,02% dari tahun 2015). Selanjutnya, pada tahun 2017 UMP tercatat Rp.2.416.855 (naik 8,04% dari tahun 2016).

Kenaikan UMP di Provinsi Papua Barat membawa dampak positif bagi masyarakat. Dampak positif yang dihasilkan misalnya adalah terpenuhinya standar kebutuhan hidup layak, artinya dengan adanya kenaikan UMP maka akan

mewujudkan kesejahteraan hidup para karyawan dan keluarganya agar tetap terjaga. Selanjutnya yaitu, konsumsi masyarakat akan meningkat. Jika konsumsi masyarakat meningkat berarti daya beli masyarakat juga akan meningkat sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional secara keseluruhan. Meningkatnya konsumsi masyarakat juga bisa mendorong munculnya jenis-jenis usaha baru. Sehingga potensi terbukanya lapangan karyawan baru semakin besar dan akan menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dan dampak positif yang terakhir yaitu penyesuaian upah. Penyesuaian upah pada karyawan di setiap jenjang pada suatu perusahaan, akan mencegah kecemburuan antara karyawan. Karyawan yang sudah bekerja lebih lama tentunya membutuhkan apresiasi lebih dari perusahaan. Begitupun dengan yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi pastinya juga perlu penyesuaian pendapatan. Sehingga mereka bisa lebih stabil secara finansial dan meningkatkan taraf hidupnya, dan dapat meningkatkan produktifitas kinerjanya.

Tabel 2. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Manokwari Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2013-2017

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.93	6.24	4.54	2.16	3.87
Pertambangan dan Penggalian	0.15	8.65	4.04	2.24	2.78
Industri Pengolahan	1.14	4.94	4.05	0.67	1.76
Pengadaan Listrik dan gas	-16.98	20.11	38.02	4.62	9.74
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.91	5.02	2.48	2.25	3.75
Konstruksi	9.09	5.82	0.28	0.98	3.29
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.03	8.36	5.42	4.52	4.52
Transportasi dan Pergudangan	7.01	7.36	5.21	3.08	2.72
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.13	6.44	3.70	0.77	2.55
Informasi dan Komunikasi	-0.78	2.59	0.99	3.40	-0.76
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.40	6.16	1.31	3.34	2.62
Real Estat	6.74	8.07	2.14	1.67	3.13
Jasa Perusahaan	5.52	8.25	7.61	0.15	2.25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.96	6.06	1.84	0.84	0.78
Jasa Pendidikan	4.16	7.96	1.52	0.49	2.41
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.21	3.99	2.86	6.56	-0.92
Jasa Lainnya	7.65	0.97	0.33	1.70	3.91
Produk Domestik Regional Bruto	4.97	6.50	2.68	2.03	2.71

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari, 2014-2017

Tabel 2 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari dari tahun 2013-2017 dari 17 sektor yang ada, semuanya dapat dikatakan memiliki peranan yang sangat penting untuk PDRB. Struktur perekonomian Papua Barat ditopang oleh tiga sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor konstruksi. Akan tetapi, jika diamati di Kabupaten Manokwari sedang gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, gedung, dll. Meskipun disetiap tahunnya tidak begitu mengalami peningkatan yang cukup drastis tetapi secara perlahan lahan disetiap tahunnya mengalami peningkatan.

Kabupaten Manokwari adalah ibu kota Provinsi Papua Barat sehingga ketabilan dan kesejahteraan kabupaten ini menjadi tolak ukur atau gambaran

kemajuan Provinsi Papua Barat. Saat ini Kabupaten Manokwari dalam masa pembangunan di segala bidang. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara jumlah penduduk usia produktif, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kontribusi Sektor Konstruksi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Manokwari.

Commented [WU1]: Belum terlihat research gapnya

Commented [WU2]: Belum terlihat research gap

LANDASAN TEORI

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2000), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabanya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

2. Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan maka harus mempertimbangkan PDRB riil satu tahun dengan PDRB rill tahun sebelumnya, diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \frac{PDRB_{it} - PDRB_{to}}{PDRB_{to}} \times 100$$

Dimana:

Y_{it} = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota i, tahun t

$PDRB_{it}$ = PDRB ADHK kabupaten/kota i, tahun t

$PDRB_{to}$ = PDRB ADHK kabupaten kota i, tahun t-1

Ada beberapa alat pengukuran pertumbuhan ekonomi:

1) Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) atau yang ditingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka 1 tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. PDB ataupun PDRB adalah ukuran yang bersifat global dan keduanya ini bukan merupakan alat ukur yang sesuai karena belum dapat mensejahterakan penduduk

yang sesungguhnya, padahal kesejahteraan harus dimiliki oleh setiap negara atau daerah yang bersangkutan.

2) Produk Domestik Regional Bruto Per kapita

Produk domestik regional per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

Ketimpangan antar wilayah

Ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga tiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan. Perbedaan wilayah ini yang menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang. Menurut hipotesa Neo-Klasik, dalam proses pembangunan awalnya ketimpangan akan meningkat, proses ini akan terjadi hingga ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah mencapai titik puncak dan proses pembangunan masih terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008; Bakri, Syafrizal, 2015; Ginting, 2015)

Ketimpangan antar wilayah dalam kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Dengan adanya ketimpangan, maka akan mendorong daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas pembangunannya agar tidak tertinggal dengan daerah yang sudah maju. Selain dampak positif dari adanya ketimpangan dalam pembangunan, adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah maka akan semakin terjadi inefisiensi ekonomi, sehingga melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dianggap tidak adil (Todaro and Smith, 2006).

Indeks Williamson

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang (Razak, 2011; Ginting, 2015; Syahrial, Hakim and Purnamadewi, 2015).

Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah

Arsyad (1999) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

- 1) Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita,
- 2) Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang,

- 3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
- 4) Investasi yang banyak dilakukan pada proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga menambah jumlah pengangguran,
- 5) Rendahnya mobilitas sosial,
- 6) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis,
- 7) Kondisi memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagan ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap ekspor negara yang sedang berkembang,
- 8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya.

Hubungan Antara Penduduk Usia Produktif Dengan Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan penduduk usia produktif sangat erat kaitannya dengan ketimpangan pendapatan karena pertambahan penduduk yang tinggi yang tidak selaras dengan ketersediaan lapangan kerja maka pendapatan perkapita akan menurun, sehingga menimbulkan permasalahan kemiskinan yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, dan kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin semakin melebar (Arka and Yasa, 2015; Syam, 2015; Anggina and Artaningtyas, 2017)

Hubungan Antara Upah Minimum Provinsi Dengan Ketimpangan Pendapatan

Tujuan penetapan upah minimum yaitu sebagai jaring pengamanan agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan, meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah, pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja, perubahan struktur industri sektoral, peningkatan produktifitas kerja nasional, serta memperlancar komunikasi pekerja (Syam, 2015; Nurtiyas, 2016).

Hubungan Antara Kontribusi Sektor Industri Dengan Ketimpangan Pendapatan

Kedua hal tersebut dapat dikatakan berkaitan atau berpengaruh karena, kebijakan investasi dalam sektor konstruksi berdampak pada penyesuaian struktural terhadap ketidakmerataan pendapatan (*income inequity*), sehingga dampak dari sistem industri dan dinamikanya terhadap kualitas ekonomi, sosial, fisik, dan komponen terbangun dari lingkungan masyarakat, khususnya kondisi pasar tenaga kerja, pendapatan rill, kesejahteraan, dan sejenisnya (Iswanto, 2015; Adinugroho, 2017). Untuk dapat mengatasi persoalan yang akan ditimbulkan oleh pembangunan industri, pemerintah daerah perlu mengetahui gambaran menyeluruh mengenai

industri itu sendiri serta dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan pada distribusi pendapatan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dan data sekunder yang digunakan berupa data institusi resmi terkait dan juga bersumber dari studi pustaka. Data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik maupun dari instansi lainnya yang terkait di Kabupaten Manokwari. Data yang diambil antara lain data usia produktif, upah minimum provinsi, kontribusi sektor konstruksi, dan distribusi pendapatan daerah tahun 2013 hingga tahun 2017.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur ketimpangan digunakan alat ukur Indeks Williamson, sedangkan untuk mengidentifikasi bentuk hubungan antara faktor terhadap ketimpangan digunakan analisis korelasi pearson dan pengolahan data dilakukan dengan aplikasi SPSS.

1. Analisis Ketimpangan (Indeks Williamson)

Tingkat ketimpangan dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Solichin, 2016; Islami and Nugroho, 2018).

$$IW = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}}$$

Dimana:

- | | |
|-------|--|
| Y_i | = PDRB per kapita daerah |
| Y | = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah |
| f_i | = Jumlah penduduk daerah i |
| N | = Jumlah penduduk seluruh daerah |

Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang.

2. Korelasi Pearson

Korelasi Pearson biasanya disebut dengan korelasi produk momen atau korelasi saja. Nilai dari korelasi ini adalah r yang besarnya antara -1 hingga 1. Jika $r < 0$ maka artinya berkorelasi negatif, artinya jika nilai salah satu perubah semakin besar maka perubah yang lain akan semakin kecil. Sebaliknya jika $r > 0$ maka artinya terjadi hubungan linear yang positif. Jika $r = 0$ artinya berkorelasi tetapi bukan berarti tidak berhubungan, mungkin berhubungan namun tidak linear. Semakin mendekati nilai r dengan 1 atau -1 maka semakin erat hubungan linear

antar perubah tersebut (Ilham, 2015; Permana, 2016; Setiawan, 2016). Adapun rumus Korelasi Pearson yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Dimana:

r_{xy}	= Koefesien korelasi yang dicari
$\sum xy$	= Jumlah perkalian variabel x dan y
$\sum x$	= Jumlah nilai variabel x
$\sum y$	= Jumlah nilai variabel y
$\sum x^2$	= Jumlah pangkat dua nilai variabel x
$\sum y^2$	= Jumlah pangkat dua nilai variabel y
n	= Banyak sampel

Dalam penelitian ini digunakan alat uji Korelasi Pearson untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Dalam analisis korelasi terdapat derajat hubungan atau derajat asosiasi antara dua variabel dengan nilai uji korelasi sebagai berikut:

Dasar pengambilan keputusan (Sarwono 2006) yaitu: 1) Jika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka “berkorelasi” dan 2) Jika nilai signifikansinya $> 0,05$ maka “tidak berkorelasi”.

Pedoman Derajat Hubungan Variabel adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai pearson correlation 0,00 s/d 0,20 = Tidak ada
- 2) Nilai pearson correlation 0,21 s/d 0,40 = Korelasi lemah
- 3) Nilai pearson correlation 0,41 s/d 0,60 = Korelasi sedang
- 4) Nilai pearson correlation 0,61 s/d 0,80 = Korelasi kuat
- 5) Nilai pearson correlation 0,81 s/d 1,00 = Korelasi sempurna

Definisi Operasional Variabel

Berikut ini penjelasan dari faktor yang digunakan untuk melihat arah hubungan dan interaksi setiap faktor. Data setiap faktor adalah dalam rentang waktu tahun 2013-2017 yang diperoleh dari BPS Kabupaten Manokwari dan instansi lain yang terkait.

1. Ketimpangan Pendapatan
Ketimpangan diukur dengan menggunakan Indeks Williamson, dimana data yang digunakan adalah PDRB perkapita dan jumlah penduduk.
2. Penduduk Usia Produktif
Penduduk usia produktif adalah yang berusia 15-65 tahun yang berdomisili di Kabupaten Manokwari.
3. Upah Minimum Provinsi
Upah Minimum Provinsi yaitu upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari yang diukur dalam satuan rupiah.

4. Sektor Konstruksi

Nilai kontribusi diukur menggunakan laju indeks implisit PDRB kabupaten Manokwari dalam satuan persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Variabel Penduduk Usia Produktif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

Dalam hubungan variabel penduduk usia produktif dengan ketimpangan distribusi pendapatan digunakan data jumlah penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif yang digunakan adalah dari usia 15 sampai 65 tahun di Kabupaten Manokwari selama 5 tahun terakhir (2013-2017). Sedangkan untuk melihat ketimpangannya adalah diukur menggunakan Indeks Williamson selama 5 tahun terakhir (2013-2017). Data tersebut kemudian di uji menggunakan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Correlations

[DataSet0]

		Correlations	
		Usia Produktif	Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Usia Produktif	Pearson Correlation	1	.991 **
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	5	5
Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Pearson Correlation	.991 **	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	5	5

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Commented [WU3]: Buat tabel baru (bukan hasil output pengolahan data)

Gambar 1. Korelasi Variabel Penduduk Usia Produktif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil olah data diatas menunjukkan bahwa X1 (Penduduk Usia Produktif) dengan Y (Ketimpangan Distribusi Pendapatan) mempunyai nilai atau tingkat keeratan, karena nilai signifikansinya lebih kecil dari (<) 0,05 jadi dapat dikatakan “berkorelasi”. Kemudian, jika dilihat dari derajat hubungan antara X1 (Penduduk Usia Produktif) dan Y (Ketimpangan Distribusi Pendapatan) memiliki nilai pearson correlation sebesar 0,991 yang artinya tingkat hubungan antara X1 (Penduduk Usia Produktif) dan Y (Ketimpangan Distribusi Pendapatan) masuk dalam kategori “korelasi sempurna”. Sedangkan jika ingin melihat apakah arah hubungannya positif atau negatif, bisa dilihat dari nilai pearson correlation sebesar

0,991. Nilai tersebut menunjukkan bahwa X1 (Penduduk Usia Produktif) dan Y (Ketimpangan Distribusi Pendapatan) mempunyai hubungan yang positif

Hubungan Variabel UMP dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dalam hubungan variabel UMP terhadap distribusi ketimpangan pendapatan, data yang digunakan adalah UMP yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari di setiap tahunnya (2013-2017). Sedangkan untuk melihat ketimpangannya adalah diukur menggunakan Indeks Williamson selama 5 tahun terakhir (2013-2017). Data tersebut kemudian di uji menggunakan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

→ Correlations

Correlations		
	UMP	Ketimpangan Distribusi Pendapatan
UMP	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .996** .000 5
Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.996** .000 1 5

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar 2. Korelasi Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil olah data diatas menunjukkan bahwa X2 (UMP) dengan Y (Ketimpangan Distribusi Pendapatan), mempunyai nilai keeratan karena nilai signifikansinya lebih kecil dari ($<$) 0,05 jadi dikatakan “berkorelasi”. Jika dilihat dari arah hubungan antara X2 (UMP) dan Y (Ketimpangan Distribusi Pendapatan), memiliki nilai pearson correlation sebesar 0,996 yang artinya tingkat hubungan antara X2 (UMP) dengan Y (Ketimpangan Distribusi Pendapatan) masuk dalam kategori “Korelasi sempurna”. Nilai person correlation sebesar 0,996 menunjukkan bahwa X2 (UMP) dan Y (Ketimpangan Distribusi Pendapatan) mempunyai hubungan yang positif.

Hubungan antara variabel Kontribusi Sektor Konstruksi dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

Dalam hubungan variabel kontribusi sektor konstruksi terhadap distribusi ketimpangan pendapatan, data yang digunakan adalah Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Manokwari Menurut Lapangan Usaha, yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Manokwari 5 tahun terakhir (2013-2017) dalam satuan rupiah. Sedangkan untuk melihat ketimpangannya adalah diukur menggunakan Indeks Williamson selama 5 tahun terakhir (2013-2017). Data tersebut kemudian di uji menggunakan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

→ Correlations

Correlations			
		Sektor Konstruksi	Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Sektor Konstruksi	Pearson Correlation	1	.970**
	Sig. (2-tailed)		.006
	N	5	5
Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Pearson Correlation	.970**	1
	Sig. (2-tailed)	.006	
	N	5	5

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar 3. Korelasi Variabel Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil olah data yang dilakukan menunjukkan bahwa X3 (Kontribusi Sektor Konstruksi) dengan Y (Ketimpangan Distribusi Pendapatan) tidak memiliki hubungan keeratan, karena nilai signifikansinya lebih besar dari (>) 0,05 jadi dikatakan “tidak berkorelasi”. Jika dilihat dari derajat hubungan antara X3 (Kontribusi Sektor Konstruksi) dan Y (Ketimpangan Distribusi Pendapatan), memiliki nilai pearson correlation sebesar 0,970 yang artinya tingkat hubungan antara X3 (Kontribusi Sektor Konstruksi) dan Y (Ketimpangan Distribusi Pendapatan) masuk ke dalam kategori “Korelasi Sempurna”. Nilai *pearson correlation* sebesar 0,970 menunjukkan bahwa X3 (Kontribusi Sektor Konstruksi) dan Y (Ketimpangan Distribusi Pendapatan) memiliki hubungan yang positif.

Dari hasil analisis ketiga variabel X terhadap Y dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas memiliki hubungan sangat erat, positif, linier dan signifikan terhadap variabel tak bebas. Semakin besar proporsi penduduk usia produktif, UMP dan kontribusi sektor konstruksi akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah, yang dalam kasus ini adalah di Kabupaten Manokwari. Penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah tersebut disebabkan oleh pertumbuhan

penduduk usia produktif yang tinggi dan tidak selaras dengan ketersediaan lapangan kerja, Upah Minimum juga sangat berpengaruh terhadap ketimpangan yang terjadi karena upah adalah tolok ukur untuk pekerja agar bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik, penyebab lainnya yaitu kontribusi sektor konstruksi, dikatakan berpengaruh karena kebijakan investasi dalam sektor konstruksi berdampak pada penyesuaian struktural terhadap ketidakmerataan pendapatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa variabel Penduduk Usia Produktif, UMP, dan Kontribusi Sektor Konstruksi secara parsial memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan dengan nilai korelasi tinggi. Ketimpangan antar wilayah disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk usia produktif yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, serta upah minimum yang mempengaruhi ketimpangan karena menjadi tolok ukur kemampuan pekerja. Selain itu, kontribusi sektor konstruksi berpengaruh karena kebijakan investasi di sektor ini menyebabkan penyesuaian struktural yang memengaruhi ketidakmerataan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, G. (2017) ‘Hubungan perkembangan wisata terhadap ekonomi wilayah di gunungkidul selatan. Journal of Regional and Rural Development Planning’, *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 1(1), pp. 16–27.
- Anggina, D. and Artaningtyas, W.D. (2017) ‘Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014’, *Buletin Ekonomi*, 15(1), pp. 13–40.
- Arka, S. and Yasa, I.K.O.. (2015) ‘Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali’, *Jurnal ekonomi kuantitatif terapan*, 8(1), p. 44328.
- Arsyad, L. (1999) *Ekonomi Pembangunan*. 3rd edn. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Bakri, Syafrizal, H.A. (2015) ‘Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya’, *Jurnal Kajian Ekonomi*, 4(7), pp. 101–108. Available at: http://repository.unp.ac.id/1800/1/ZUL AZHAR_71_99.pdf.
- Bantika, V., Benu, O.L. and Kapantow, G.H. (2015) ‘Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara’, *In Cocos*, 6(17).
- Ginting, A.M. (2015) ‘Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah terhadap Kemiskinan di Indonesia’, *Jurnal Kajian*, 20(1), pp. 45–58. Available at: <http://news.bisnis.com/read/20140721/15/244928/>.

- Ilham, I. (2015) ‘Analisis Hubungan Kausalitas Pengangguran, Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo’, *Mualmalah*, 5(1), pp. 27–38.
- Islami, F.S. and Nugroho, S.B.M. (2018) ‘Faktor-faktor mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia’, *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(1).
- Iswanto, D. (2015) ‘Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur’, *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1).
- Nurtiyas, F. (2016) ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014.’, *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 5(2), pp. 166–175.
- Octastefani, T. and Kusuma, B.M.. (2015) ‘Peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pariwisata’, *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1), pp. 1–16.
- Permana, R. (2016) ‘Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi kalimantan timur’, *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), pp. 111–129.
- Razak, A.R. (2011) ‘Economic growth and regional development disparity in South Sulawesi’, *Economic Journal of Emerging Markets*, pp. 275–287.
- Setiawan, J. (2016) *Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan antar Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2014*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sjafrizal (2008) *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. 1st edn. Padang: Baduose Media.
- Solichin, M.A. (2016) ‘Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Regional dan Konvergensi Antar Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara 2002-2011’, *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 10(1).
- Syahrial, S., Hakim, D.B. and Purnamadewi, Y.L. (2015) ‘Disparitas Regional Provinsi Sumatera Barat di Era Otonomi Daerah’, *TATALOKA*, 17(1), pp. 53–63.
- Syam, S. (2015) ‘Pengaruh upah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap tingkat pengangguran di kota Makassar’, *Jurnal Iqtisaduna*, 1(1), pp. 30–45.
- Todaro, M.P. (2000) *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M.P. and Smith, S.C. (2006) *Pembangunan Ekonomi*. 1st edn. Jakarta: Erlangga.